



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS SYIAH KUALA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **TAUFIQ SAIDI**
2. Jabatan : **WAKIL REKTOR BIDANG PERENCANAAN, KEMITRAAN, DAN BISNIS**
3. NHK : **626098**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **5.915.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 823 m2/380 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 2.850.000.000
2. Tanah Seluas 747 m2 di KAB / KOTA BIREUEN, WARISAN Rp. 155.000.000
3. Tanah Seluas 1.378 m2 di KAB / KOTA BIREUEN, WARISAN Rp. 200.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 540 m2/540 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI , WARISAN , Rp. 1.700.000.000
5. Tanah Seluas 128 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
6. Tanah Seluas 350 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 310.000.000
7. Tanah Seluas 350 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 360.000.000
8. Tanah Seluas 717 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 285.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **395.000.000**

1. MOBIL, HONDA CR-V JEEP Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000



2. MOBIL, VW COMBI MINIBUS Tahun 1977, HASIL SENDIRI Rp.
40.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI
Rp. 10.000.000
4. MOBIL, HONDA HR-V Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
230.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	116.217.707
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	6.426.217.707
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.426.217.707

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.